

Judul : Demi hemat energi, pemerintah munculkan opsi WFH bagi ASN
Tanggal : Rabu, 25 Maret 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 2

Situasi Timteng Masih Memanas

Demi Hemat Energi, Pemerintah Munculkan Opsi WFH Bagi ASN

Pemerintah Prabowo Subianto berencana melakukan penghematan berenergi konflik yang terjadi di Timur Tengah pasca Amerika Serikat (AS) dan Israel menyerang Iran. Salah satunya dengan mempertimbangkan *Work From Home* (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Rencana ini pun menjadi perbincangan.

Hal ini disampaikan Prabowo usai menjelaskan langkah Pakistan menghemat anggaran usai eskalasi tersebut, dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (13/3/2026). Pakistan telah menganggap perang antara AS-Iran sebagai situasi kritis hingga menyebutnya sebagai "critical measures". Prabowo meminta Pemerintah Indonesia mempelajarinya.

"Ini hanya contoh ya, ini contoh. Maksud saya ini ada berapa hari, saya kira kita bisa mengkaji masalah ini. Saya kira, kita juga harus meng-

upayakan bahwa kita melakukan penghematan," kata Prabowo.

Prabowo menuturkan, penghematan tetap perlu dilakukan meski situasi ini belum mencapai tingkat terburuk. Dengan begitu, defisit APBN tidak membengkak lebih lanjut akibat kenaikan harga minyak dunia pascakonflik.

"Saya percaya dua tiga tahun kita akan sangat kuat, tapi tetap kita harus hemat konsumsi. Bahkan, cita-cita kita adalah kalau bisa kita tidak punya defisit," ujar Prabowo.

Dia memerinci, sejumlah langkah yang dapat dilakukan adalah melaksanakan WFH atau bekerja dari rumah, melakukan efisiensi, hingga menghemat BBM dalam jumlah yang sangat besar. Dia pun meminta para menteri-nya mengkaji lebih lanjut.

"Nah, jadi ini saya minta dibicarakan nanti yang mungkin oleh Menko-Menko nanti berapa hari ini kita lihat. Kita pikirkan. Dulu kita atasi Covid-19,

berhasil kita. Dan kita mampu," tutur Prabowo.

Dia menambahkan, umpamanya berupa ASN dan pejabat tidak usah ke kantor, mengurangi macet dan melaksanakannya penghematan besar-besaran.

"Mengurangi hari kerja pun harus kita pertimbangkan dan langkah-langkah penghematan lainnya," imbuh dia.

Menanggapi rencana Prabowo tersebut, Pengamat Kebijakan Publik Universitas Brawijaya Malang Andhyka Muttuqin menilai, keputusan Presiden untuk mempertimbangkan kebijakan WFH bagi ASN, dapat dipahami sebagai langkah antisipatif Pemerintah dalam merespons situasi global yang sedang tidak stabil.

Dia menambahkan, dalam tata kelola pemerintahan modern, kebijakan negara tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi domestik, tetapi juga oleh dinamika internasional yang dapat berdampak pada stabilitas ekonomi, sosial, dan

politik di dalam negeri.

"Ketika terjadi konflik geopolitik yang berpotensi memicu ketidakpastian global, Pemerintah biasanya mengambil langkah-langkah mitigasi untuk meminimalkan dampaknya terhadap negara," ujar Andhyka kepada *Rakyat Merdeka*, Minggu (16/3/2026).

Andhyka berpendapat, salah satu pertimbangan yang kemungkinan muncul adalah efisiensi mobilitas dan penggunaan energi. Konflik di kawasan Timur Tengah sering kali berdampak pada kenaikan harga minyak dunia.

"Bagi negara seperti Indonesia yang masih bergantung pada impor energi, kenaikan harga minyak dapat meningkatkan beban ekonomi nasional dan berpotensi menekan anggaran negara," katanya.

Dalam konteks tersebut, lanjut dia, kebijakan WFH dapat menjadi salah satu instrumen untuk mengurangi mobilitas harian pegawai, terutama di

kota-kota besar yang memiliki tingkat konsumsi bahan bakar tinggi. "Dengan berkurangnya perjalanan ke kantor, penggunaan bahan bakar dapat ditekan," lanjutnya.

Anggota Komisi II DPR dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menilai, jika tujuan WFH bagi ASN untuk penghematan energi atau ekonomi nasional, maka hal itu tidak cukup. Menurut dia, Pemerintah harus mencari cara lain agar penghematan itu bisa langsung berdampak.

"Harus ada penghematan drastis yang dilakukan Pemerintah. Tapi pada bidang yang tidak ganggu target pertumbuhan ekonomi dah tidak ganggu pelayanan publik," ujar Mardani kepada *Rakyat Merdeka*, Minggu (15/3/2026).

Untuk mengetahui pandangan dari Andhyka Muttuqin dan Mardani Ali Sera mengenai rencana Pemerintah melaksanakan WFH bagi ASN, berikut wawancaranya.

MARDANI ALI SERA, Anggota Komisi II DPR

Tidak Cukup Hanya Melakukan WFH ASN



Bagaimana Anda melihat pertimbangan dari Presiden untuk melakukan *Work From Home* (WFH) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) di tengah kondisi global saat ini?

Bagus-bagus dari usaha Indonesia terhadap kondisi global saat ini ya. Tapi tidak cukup juga hanya dengan kebijakan tersebut.

Seharusnya bagaimana? Menurut saya, harus ada penghematan drastis yang dilakukan oleh Pemerintah. Tapi pada bidang yang tidak ganggu target pertumbuhan ekonomi dah tidak ganggu pelayanan publik.

Konkretnya seperti apa itu? Misalnya saja pada zaman Da Susi Pujastuti menjadi menteri ya. Beliau

menghapus kata 'sosialisasi' dalam satu kementerian. Dari kebijakannya itu, negara bisa menghemat puluhan miliar rupiah. Nah, bagaimana jika itu dilakukan. Kan ada hampir lima puluh kementerian.

Jadi ada opsi selain menerapkan WFH bagi ASN dalam rangka penghematan ya Pak?

Iya. Belum lagi anggaran untuk kajian yang ada di Kementerian/Lembaga. Zaman Pak Abok (Basuki Tjahaja Purnoma) menjadi Gubernur di DKI Jakarta, Pemprov DKI melototi anggaran hingga satuannya, sehingga bisa menghemat hampir satu triliun.

Menurut Anda, apa target utama Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan WFH bagi ASN ini?

Memotong anggaran dengan sukarela pada kegiatan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta mengalokasikannya pada rakyat adalah tindakan berani

ANDHYKA MUTTAQIN, Pengamat Kebijakan Publik

Kebijakan Ini Relevan Di Situasi Global



Apakah kebijakan *Work From Home* (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) efektif di tengah situasi global yang sedang terjadi konflik?

Efektivitas kebijakan WFH sangat bergantung pada tujuan kebijakan yang ingin dicapai oleh Pemerintah. Jika tujuan kebijakan tersebut adalah untuk mengurangi mobilitas, meningkatkan efisiensi operasional birokrasi, serta menekan konsumsi energi dalam situasi global yang tidak pasti, maka kebijakan ini dapat dianggap cukup relevan.

Artinya, WFH bisa membantu mengurangi penggunaan energi? Ya dengan berkurangnya aktivitas perjalanan pegawai ke kantor, penggunaan kendaraan dan konsumsi bahan bakar juga akan berkurang. Hal ini dapat membantu mengurangi tekanan

terhadap penggunaan energi nasional, terutama jika harga minyak dunia mengalami kenaikan akibat konflik geopolitik. Namun perlu dipahami, bahwa kebijakan WFH tidak secara langsung mampu mengatasi dampak besar dari konflik internasional.

Kenapa seperti itu? Konflik geopolitik biasanya memengaruhi banyak aspek ekonomi global, seperti stabilitas pasar keuangan, perdagangan internasional, serta harga komoditas dunia. Dampak tersebut membutuhkan kebijakan yang lebih luas.

Kebijakan yang lebih luas itu seperti apa? Misalnya melalui kebijakan fiskal, kebijakan energi, pengendalian inflasi, maupun langkah diplomasi ekonomi.

Menurut Anda, apa dampak konflik Amerika Serikat-Israel vs Iran terhadap Indonesia?

Konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran sebenarnya tidak secara langsung melibatkan Indonesia, tetapi dampaknya dapat terasa melalui berbagai jalur ekonomi dan geopolitik global. Salah satu dampak yang paling signifikan adalah melalui sektor energi. Timur Tengah merupakan kawasan yang memiliki cadangan minyak dan gas terbesar di dunia. ■ NNM

Memotong anggaran dengan sukarela pada kegiatan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta mengalokasikannya pada rakyat adalah tindakan berani

“DPR RI”